

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Pada landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam menganalisis hasil-hasil penelitian nantinya. Teori-teori yang dibahas meliputi teori keagenan, teori persepsi, kecenderungan akuntansi, moralitas aparat, asimetri informasi, dan sistem pengendalian internal.

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Dalam teori agensi terdapat *Agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar memaksimalkan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa manajer tidak menanggung resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, para manajer cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan

pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status (Jensen and Meckling, 1976 dalam Ardiana Peni Rahmawati, 2012).

Menurut Watt dan Zimmerman (1986) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) secara empiris membuktikan bahwa hubungan *principal* dan *agent* yang sering ditentukan oleh angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen maka pemilik perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi.

### 2.1.2. Persepsi

Persepsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

Menurut Setiadi (2003) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) tiga faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi seseorang adalah karakteristik dari stimulasi, hubungan stimulasi dengan sekelilingnya, dan kondisi-kondisi di dalam diri sendiri. Persepsi tidak hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulasi, tetapi juga karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulasi tersebut dan bermula dari kondisi biologisnya. Robbins Feldman (1998) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku persepsi, karena dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan arahan.
- 2) Obyek/ target yang dipersepsikan, misalnya penampilan yang mencolok lebih menarik perhatian.
- 3) Situasi dimana persepsi itu dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan seseorang atau individu terhadap objek, subjek, atau peristiwa. Davidoff (1981) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu kerja yang rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa.

### **2.1.3. Kecurangan Akuntansi**

Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) dalam menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga. IAI tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kecurangan akuntansi merupakan kejahatan, namun sebagai pakar hukum menganggap kecurangan akuntansi sebagai kejahatan.

Hasil-hasil penelitian tentang kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi di suatu Negara. Hasil penelitian Mayangsari dan Wilopo (2002) dalam Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2014) membuktikan bahwa internal birokrasi memberikan

pengaruh terhadap kecurangan akuntansi pemerintahan. Artinya, semakin baik pengendalian internal birokrasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi pemerintah.

#### **2.1.4. Moralitas Aparat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Selanjutnya dikatakan bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas merupakan pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani
- 2) Moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Menurut Amrizal (2004) dalam Petra Zulia Aranta (2013), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan/aparat terhadap perbuatan salah tersebut, bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyalurkan

tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi.

#### **2.1.5. Asimetri Informasi**

Salah satu kendala yang akan muncul antara *principal* dan *agent* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini timbul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Nasution dan Doddy, 2007 dalam Ardiana Peni Rahmawati 2012). Asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

Menurut Scott (2000) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang

saham dengan melanggar kontrak yang sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

#### **2.1.6. Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Mulayadi dan Puradiredja (1998) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012), Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Sedangkan menurut Waren, Reeve, dan Fees (1999) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Perkembangan pengendalian internal pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan SPIP tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. PP SPIP juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal

dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan PP SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.



5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Mulyadi (2009) menyatakan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal diantaranya adalah:

- a) Manajemen, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya.
- b) Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi.
- c) Direktur bagian keuangan dan akuntansi menjalankan peran penting dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan organisasi, penyusunan rencana dan anggaran perusahaan, penilaian dan analisis kinerja, serta pencegahan dan pendeteksian pelaporan keuangan yang menyesatkan.
- d) Dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memeriksa apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal, sedangkan fungsi komite audit secara langsung berdampak pada auditor.

- e) Auditor internal, bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.
- f) Personil lain entitas. Peran dan tanggung jawab semua personil lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.
- g) Auditor independen. Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris.
- h) Pihak luar lain. Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur (*regulatory body*), seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Badan pengatur ini mengeluarkan persyaratan minimum pengendalian internal yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu memiliki kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan instansi pemerintahan Daerah kabupaten/kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam

menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan terciptanya akuntabilitas keuangan dan sebagai upaya mencegah organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan oleh manajer dan bawahannya.

Dengan sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan terhindarnya organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan oleh manajer dan bawahannya.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan di Indonesia dan di negara lain. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti yang melandasi penelitian ini, yang terdiri dari beberapa tahun yang berbeda, akan dijabarkan dalam tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

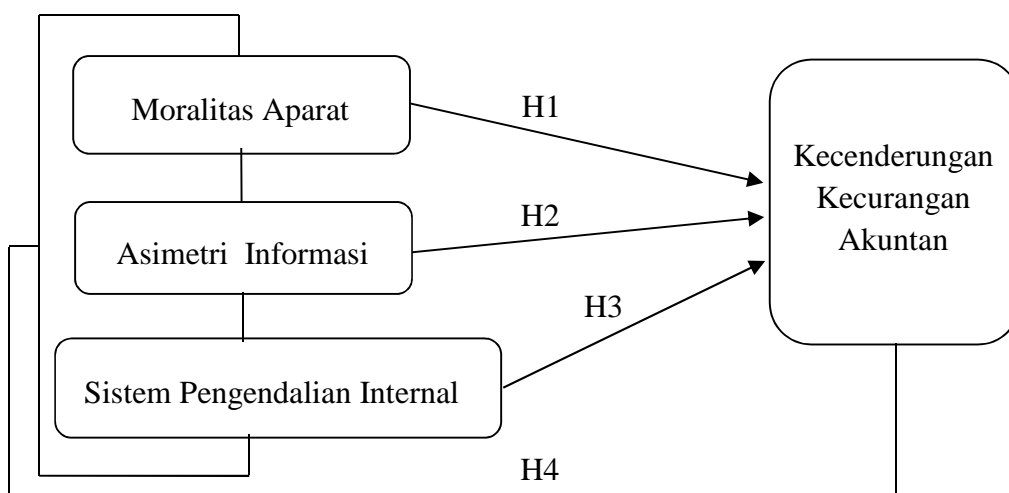
<b>Pengarang dan Tahun Publikasi</b>	<b>Variabel yang Digunakan</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Annisa Fitriana (2010)	Kecurangan Akuntansi, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi	Regresi Berganda	Pengendalian Internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif secara simultan dan parsial terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
Fauwzi (2011)	Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, perilaku tidak	Analisis regresi berganda	Pengendalian Internal dan moralitas manajemen berpengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi,

<b>Pengarang dan Tahun Publikasi</b>	<b>Variabel yang Digunakan</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	etis, kecenderungan kecurangan akuntansi		sedangkan kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis dan berpengaruh positif terhadap kecenderungan akuntansi.
Pristiyanti,I.R., (2012)	Fraud di Sektor Pemerintahan, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Komitmen organisasi	analisis full model Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat analisis smartPLS	Analisis menunjukkan bahwa Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan.Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan.Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan.Kepatuhan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan.Budaya etis organisasi berpengaruh negative terhadap fraud di pemerintahan.Komitmen organisasi berpengaruh negative terhadap fraud sector pemerintahan.
Aranta P.Z., (2013)	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud), Moralitas Aparat, Asimetri Informasi	analisis SEM (structural equation model)	Analisis menunjukkan bahwa: 1) moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 2) asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran bukan merupakan urutan-urutan langkah penelitian melainkan suatu rangkaian susunan pemikiran tentang apa yang seharusnya ada/terjadi sehingga timbul adanya hipotesis yang dimaksud. Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang terdiri dari moralitas aparat, asimetri informasi, dan sistem pengendalian internal dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Kerangka pemikiran teoritis merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, kerangka pemikiran teoritis ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### 2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka, serta merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Pada hipotesis

ini akan dipaparkan hubungan moralitas aparat, asimetri informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### **2.4.1. Hubungan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)**

Moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku seorang individu. Karena moralitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Moralitas yang buruk akan membuat individu cenderung berperilaku ketindak kecurangan akuntansi. Dalam suatu perusahaan atau instansi yang diwakili aparat didalamnya, moralitas aparat merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap tindakan yang diambil perusahaan/instansi.

Seperti telah dihipotesiskan di atas, bahwa moralitas manajemen berpengaruh pada perilaku etisnya. Penelitian ini juga berpendapat moralitas aparat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas aparat, semakin aparat memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas aparat, semakin aparat berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

$H_1$  : Moralitas aparat berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Fraud)

#### **2.4.2. Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)**

Salah satu kendala yang akan muncul antara *principal* dan *agent* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini timbul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Nasution dan Doddy, 2007 dalam Ardiana Peni Rahmawati 2012). Asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

H2 : Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud)

#### **2.4.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)**

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi adanya suatu perilaku kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang efektif dapat membuat peluang untuk melakukan suatu perilaku kecurangan akuntansi menjadi tertutup. Oleh karena itu, perilaku kecurangan akuntansi dapat dicegah dengan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Pengendalian internal yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. AICPA (1947) dalam Ardiana Peni Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Meski terdapat pendapat yang berbeda, penelitian ini berpendapat bahwa pengendalian internal yang efektif mempengaruhi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).

H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud)

#### **2.4.4. Hubungan Moralitas Aparat, Asimetri Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)**

Bahwa hipotesis keempat yaitu pengaruh Moralitas Aparat, Asimetri Informasi dan Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. Besar kecilnya Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi yang terjadi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya moralitas aparat, asimetri informasi dan sistem pengendalian internal.

Moralitas dari karyawan berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahan merupakan faktor pemicu kecurangan. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam



perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian intrnal yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi yang terjadi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya moralitas aparat, asimetri informasi dan sistem pengendalian internal.

H4 : Moralitas aparat, asimetri informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud)